



# LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV  
**2024**

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN  
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BANGKA BELITUNG

Kompleks Perkantoran  
Pemprov. Kep. Bangka Belitung,  
Jl. Profesi No. 4 Pangkalpinang 33149  
Telp : 0717-434756; Fax : 0717-4262434  
Email : [op.skipmpangkalpinang@kkp.go.id](mailto:op.skipmpangkalpinang@kkp.go.id)

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bangka Belitung (BPPMHKP BABEL) Triwulan IV disusun sebagai wujud pertanggungjawaban BPPMHKP BABEL dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi BPPMHKP Tahun 2024. Secara umum, pada tahun 2024 seluruh target indikator kinerja yang ditetapkan telah dicapai sesuai target yang ditetapkan.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja BPPMHKP BABEL di masa mendatang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Pangkalpinang, 03 Januari 2025

Kepala



Dedy Arief Hendriyanto, S.St.Pi, M.Si

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	1
1.3. Strategi Organisasi	2
1.4. Sistematika Penyajian	3
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	4
2.1. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	4
2.2. Pengukuran Kinerja	5
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	6
3.1. Capaian Kinerja	6
3.2. Analisis dan Evaluasi	6
3.3. Realisasi Anggaran	14
BAB 4. PENUTUP	15
4.1. Kesimpulan	15
4.2. Rekomendasi	15

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPPMHKP BABEL Tahun 2024	4
Tabel 2	Penyerapan Anggaran per Kegiatan Triwulan IV 2024	14
Tabel 3	Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan IV 2024	14

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi BPPMHKP BABEL	2
Gambar 2.	Dashboard Capaian IKU pasa sistem aplikasi pengelolaan kinerja	6

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai capaian kinerja Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bangka Belitung (BPPMHKP BABEL) pada Triwulan IV adalah sebesar 114,11%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPMHKP BABEL yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

1. Seluruh target IKU yang ditetapkan telah dicapai sesuai target yang ditetapkan.
2. Uraian IKU yang menjadi target Triwulan IV, yaitu:
  - a. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang.
  - b. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang.
  - c. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang.
  - d. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang.
  - e. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang.
  - f. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang.
  - g. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT SKIPM Pangkalpinang.
  - h. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang.
  - i. Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang.
  - j. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang.
  - k. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang.
  - l. Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang.
  - m. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang.
  - n. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang.
  - o. Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang.

Kinerja keuangan BPPMHKP BABEL Triwulan IV Tahun 2024 melalui program pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dengan pagu alokasi anggaran sebesar Rp 5.836.936.000. Realisasi penyerapan anggaran BPPMHKP BABEL Triwulan IV tahun 2024 mencapai Rp 5.758.940.592, atau sebesar 98,66%.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bangka Belitung (BPPMHKP BABEL) merupakan salah satu Unit Pelaksana di BPPMHKP. BPPMHKP BABEL mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPMHKP BABEL dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban BPPMHKP BABEL dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2023 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP BABEL. Di samping itu, laporan ini juga berfungsi sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan BPPMHKP BABEL serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja BPPMHKP BABEL. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### 1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPMHKP menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPPMHKP, BPPMHKP BABEL dipimpin oleh seorang Kepala dengan dibantu oleh 4 Tim Kerja yaitu Tim Kerja Pengendalian Mutu, Tim Kerja Pengawasan Mutu, Tim Kerja Standarisasi Sistem dan Tim Kerja Dukungan Manajerial dan Data Informasi serta kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPPMHKP BABEL

### 1.3. STRATEGI ORGANISASI

Aspek strategis organisasi merupakan penjabaran lebih detail dari tujuan BPPMHKP Babel dengan indikator dan target yang terukur. Aspek strategis tersebut dijabarkan melalui sasaran kegiatan BPPMHKP Babel tahun 2024 sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Meningkatkan ekspor produk perikanan dengan pengendalian dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan mulai dari hulu sampai hilir, sejak ikan ditangkap sampai diekspor ke negara tujuan.

Penjaminan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan dilakukan melalui pemenuhan standar mutu dan keamanan dari sektor produksi primer dan sektor produksi pasca panen, pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI, dan pemenuhan standar produk sesuai persyaratan negara tujuan, sehingga produk perikanan yang diekspor dapat diterima di negara tujuan ekspor.

Sasaran Kegiatan 2 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar

Peningkatan ekspor hasil kelautan dan perikanan tidak hanya melalui pengendalian dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan, tetapi juga melalui pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi.

### Sasaran Kegiatan 3 : Terselenggaranya Tatakelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang

Melaksanakan pengelolaan organisasi yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui penyediaan data dan informasi yang baik, benar, dan akurat, peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur, kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan, serta melakukan inovasi guna peningkatan kinerja dan mengevaluasi pelayanan kinerja melalui pelaksanaan survei kepuasan masyarakat.

#### 1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian LKJ Triwulan I Tahun 2024 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

- a. Bab I–Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
- b. Bab II–Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtiar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan
- c. Bab III–Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- d. Bab IV–Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Sasaran dan indikator kinerja BPPMHKP BABEL Tahun 2024 ditunjukkan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPPMHKP BABEL Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%)	70
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang (%)	70
		3	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang (%)	70
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang (%)	99
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang (%)	70
SK.3	Terselenggaranya Tatakelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang	6	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang (Inovasi)	1
		7	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT SKIPM Pangkalpinang (Indeks)	3,36
		8	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang (Indeks)	86
		9	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang (Nilai)	82
		10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang (Nilai)	71
		11	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang (Nilai)	93,76
		12	Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang (%)	100
		13	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang (%)	80
		14	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang (%)	80
15	Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang (%)	80		

Berdasarkan rincian indikator kinerja yang telah ditetapkan selama tahun anggaran 2024 ada 3 indikator kinerja yang menjadi target capaian Triwulan IV yaitu IK4. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI, IK5. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan., IK6. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di BPPMHKP BABEL, IK8. Indeks Profesionalitas ASN, IK11. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dan IK13. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

## 2.2. PENGUKURAN KINERJA

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

- a. Angka maksimum adalah 120;
- b. Angka minimum adalah 0;
- c. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

### 1) Polarisasi Mazimize

Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

### 2) Polarisasi Minimize

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{(1 + (1 - \text{Realisasi/Target}))\} \times 100\%$$

### 3) Polarisasi Stabilize

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target

- 4) Statis indeks capaian IKU adalah sebagai berikut



≥100  
(BAIK)



70≤X≤99  
(CUKUP)

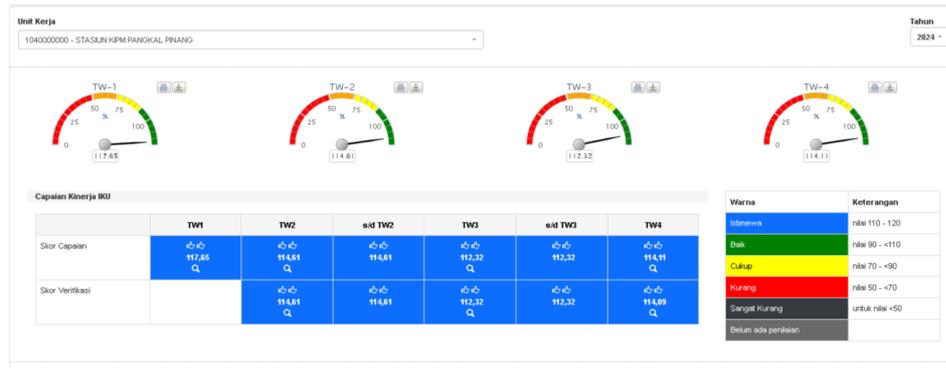


X<70%  
(KURANG)

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja BPPMHKP BABEL Triwulan IV Tahun 2024 mendapat predikat istimewa, hal ini ditandai dengan nilai capaian kinerja sebesar 112,32%, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di [www.kinerjaku.kkp.go](http://www.kinerjaku.kkp.go)



Gambar 2. Dashboard Capaian IKU pasa sistem aplikasi pengelolaan kinerja

### 3.2. ANALISIS DAN EVALUASI

Sasaran Kegiatan 1 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

IK1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya yang meliputi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB), dan Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB), serta perikanan tangkap yang meliputi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di kapal yang telah sesuai dengan standar dan kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Standar mutu dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumber daya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya, dan pengumpulan hasil laut lainnya. Standar mutu dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) serta standar lainnya yang dipersyaratkan dalam perdagangan dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Output kegiatan ini berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual. Pada tahun 2024, indikator kinerja Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang

memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup BPPMHKP Babel ditargetkan sebesar 70%, dan pada Triwulan IV terealisasi 91,67%, dengan capaian 120%.

#### IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang meliputi penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) serta Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar dan kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan merupakan upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan serta dilakukan sejak pra-produksi hingga pemasaran untuk menghasilkan produk kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar mutu dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi pasca panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, serta memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi penanganan, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran produk perikanan. Standar mutu dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI), Standar Internasional (Codex Alimentarius), serta standar lainnya yang dipersyaratkan dalam perdagangan dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sertifikat penerapan PMMT/HACCP dan SKP diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Indikator kinerja persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup BPPMHKP Babel ditargetkan sebesar 70%. Pada Triwulan IV, terealisasi sebesar 91,13% dengan capaian 120%.

#### IK3. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang

Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah Republik Indonesia merupakan ukuran terhadap pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh BPPMHKP Babel. Pengawasan mutu mencakup berbagai kegiatan, seperti bimbingan, fasilitasi, pemantauan, serta evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan.

Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah Republik Indonesia mencerminkan efektivitas pengawasan implementasi berbagai kebijakan terkait pengendalian mutu, termasuk Instruksi Presiden Nomor 1

Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Selain itu, pengawasan juga dilakukan melalui monitoring cemaran bahan berbahaya dalam produk perikanan.

Pemantauan mutu hasil kelautan dan perikanan dilakukan dengan menguji sampel terhadap berbagai parameter keamanan pangan, seperti keberadaan bakteri patogen, residu antibiotik, logam berat, serta kontaminan lainnya. Dalam rangka menjaga kualitas dan keamanan hasil perikanan, pengujian juga dilakukan terhadap kandungan marine biotoxin dan cemaran kimia berbahaya.

Indikator kinerja persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah Republik Indonesia lingkup BPPMHKP Babel ditargetkan sebesar 70%. Pada Triwulan IV, terealisasi sebesar 100% dengan capaian 120%.

#### IK4. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merupakan indikator untuk menilai seberapa besar persentase produk perikanan yang berhasil diterima di negara tujuan dibandingkan dengan total produk yang diajukan untuk ekspor. Rasio ini menggambarkan efektivitas pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka memastikan produk yang diekspor memenuhi persyaratan negara tujuan.

Peningkatan rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan pengendalian mutu yang diterapkan oleh BPPMHKP Babel telah berjalan dengan baik. Setiap produk yang diekspor harus memenuhi standar internasional, termasuk persyaratan yang ditetapkan oleh badan otoritas negara tujuan, seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan negara lainnya.

Keberhasilan dalam meningkatkan rasio ekspor juga bergantung pada penerapan standar mutu internasional, termasuk Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, seperti penerapan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), dan pemenuhan standar mutu lainnya yang dipersyaratkan dalam perdagangan global. Hal ini mencerminkan komitmen BPPMHKP Babel dalam menjamin kualitas dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi ketentuan internasional melalui pengawasan dan sertifikasi mutu yang ketat sesuai dengan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Indikator kinerja rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup BPPMHKP Babel ditargetkan sebesar 99%. Pada Triwulan IV, terealisasi sebesar 100% dengan capaian 101,01%.

#### Sasaran Kegiatan 2 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar

#### IK5. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga Inspeksi merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan laboratorium pengujian dan Lembaga Inspeksi dalam menerapkan sistem manajemen mutu sesuai dengan standar yang berlaku. Sistem ini mencakup berbagai aspek, seperti validasi metode pengujian, kalibrasi peralatan laboratorium, serta kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengujian dan inspeksi.

Sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga Inspeksi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap hasil pengujian dan inspeksi memiliki tingkat akurasi dan keandalan yang tinggi. Dengan penerapan sistem manajemen mutu yang baik, hasil pengujian dapat dijadikan dasar yang valid dalam pengambilan keputusan terkait kelayakan mutu dan keamanan produk perikanan.

Penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga Inspeksi di BPPMHKP Babel mengacu pada standar internasional seperti ISO/IEC 17025 untuk laboratorium pengujian dan ISO/IEC 17020 untuk Lembaga Inspeksi. Kepatuhan terhadap standar ini memastikan bahwa seluruh proses pengujian dan inspeksi dilakukan secara profesional, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mencapai standar yang tinggi dalam penerapan sistem manajemen mutu, BPPMHKP Babel terus melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi, pengadaan peralatan laboratorium yang sesuai standar, serta penerapan sistem kendali mutu yang ketat dalam seluruh aktivitas laboratorium pengujian dan Lembaga Inspeksi.

Pada tahun 2024, indikator kinerja nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga Inspeksi lingkup BPPMHKP Babel ditargetkan sebesar 70%. Pada Triwulan IV, terealisasi sebesar 83,10% dengan capaian 118,71%.

Sasaran Kegiatan 3 : Terselenggaranya Tatakelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang

IK6. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik, inovasi dalam pelayanan publik menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan kepada masyarakat. BPPMHKP Babel terus berupaya melakukan inovasi untuk memberikan layanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel bagi para pelaku usaha di sektor perikanan.

Salah satu inovasi layanan yang telah diterapkan adalah POPI (Pojok Pengaduan dan Informasi), sebuah layanan berbasis WhatsApp Bot yang dikembangkan untuk memudahkan pengguna jasa dalam mencari informasi terkait pelayanan di BPPMHKP Babel. POPI dirancang untuk memberikan akses cepat dan responsif terhadap berbagai pertanyaan terkait layanan, prosedur sertifikasi mutu, serta regulasi yang berlaku, tanpa perlu datang langsung ke kantor.

Melalui POPI, pengguna jasa dapat mengakses informasi yang mereka butuhkan kapan saja dan di mana saja dengan lebih praktis. Layanan ini terintegrasi dengan sistem digital lainnya yang digunakan oleh BPPMHKP

Babel, sehingga dapat memberikan jawaban yang akurat dan terkini mengenai prosedur pelayanan yang tersedia.

#### IK7. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT SKIPM Pangkalpinang

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kualitas pelayanan publik di BPPMHKP Babel. Survei IKM dilakukan secara berkala untuk menilai tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap layanan yang diberikan, sekaligus sebagai dasar untuk melakukan evaluasi dan peningkatan kualitas layanan.

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Survei ini mencakup berbagai aspek, antara lain prosedur layanan, kecepatan pelayanan, kompetensi petugas, sarana prasarana, serta kemudahan akses informasi.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2024, BPPMHKP Babel memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 3,79, melampaui target sebesar 3,36, dengan capaian 112,80%, yang masuk dalam kategori sangat baik. Hasil ini menunjukkan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi harapan pengguna jasa dan selaras dengan standar kualitas pelayanan publik.

Capaian ini juga didukung oleh berbagai upaya peningkatan pelayanan, seperti pengembangan sistem informasi layanan berbasis digital, inovasi dalam mekanisme pelayanan, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang bertugas dalam pelayanan publik. Dengan adanya survei ini, BPPMHKP Babel dapat terus melakukan perbaikan dan inovasi untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan.

#### IK8. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dalam menjalankan tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN digunakan sebagai indikator untuk menilai sejauh mana Aparatur Sipil Negara (ASN) di BPPMHKP Babel memiliki kompetensi, integritas, serta kinerja yang sesuai dengan standar profesionalisme dalam pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan berdasarkan beberapa aspek utama, termasuk kualifikasi pendidikan, kompetensi teknis dan manajerial, serta tingkat kedisiplinan dan etika kerja dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Hasil penilaian ini menjadi dasar untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan BPPMHKP Babel, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima. Indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP Babel ditargetkan sebesar 86. Pada Triwulan IV, terealisasi sebesar 89,22 dengan capaian 103,74%.

#### IK9. Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada instansi pemerintah yang mencakup perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara sistematis. Tujuan utama dari SAKIP adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran serta memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Pelaksanaan SAKIP di BPPMHKP Babel mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berbagai regulasi terkait yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Proses penilaian mandiri dilakukan dengan mengukur sejauh mana sistem perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja telah diterapkan secara optimal di lingkungan BPPMHKP Babel.

Berdasarkan hasil penilaian mandiri SAKIP Tahun 2024, BPPMHKP Babel memperoleh nilai 82,15. Hasil ini mencerminkan komitmen BPPMHKP Babel dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan amanat reformasi birokrasi. Penilaian ini didasarkan pada Surat Sekretaris BPPMHKP Nomor B.128/BPPMHKP/TU.210/I/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Hasil Penilaian Mandiri SAKIP TA 2024 UPT Lingkup BPPMHKP.

#### IK10. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang

Kinerja perencanaan anggaran merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur efektivitas pengelolaan anggaran di BPPMHKP Babel. Evaluasi terhadap kinerja perencanaan anggaran dilakukan untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal guna mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Pelaksanaan perencanaan anggaran di BPPMHKP Babel mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Pengukuran kinerja perencanaan anggaran mencakup aspek penyusunan anggaran berbasis kinerja, ketepatan dalam pengalokasian sumber daya, serta kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran.

Pada tahun 2024, indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup BPPMHKP Babel ditargetkan sebesar 71. Pada Triwulan IV, terealisasi sebesar 90,70 dengan capaian 120%.

#### IK11. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menentukan tingkat kinerja satuan kerja dalam pengelolaan anggaran. IKPA berfungsi sebagai parameter dalam menilai efisiensi, efektivitas, serta kepatuhan terhadap regulasi dalam pelaksanaan anggaran, yang bertujuan untuk

meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Penilaian IKPA mencakup berbagai aspek, termasuk ketepatan waktu dalam realisasi anggaran, kepatuhan terhadap peraturan perbendaharaan, kualitas laporan keuangan, serta efektivitas penggunaan anggaran untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Evaluasi IKPA dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa setiap satuan kerja mampu mengelola anggaran dengan baik dan meminimalkan risiko penyimpangan.

Pada tahun 2024, indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP Babel ditargetkan sebesar 93,76. Pada Triwulan IV, terealisasi sebesar 97,67 dengan capaian 104,17%.

#### IK12. Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang

Penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai tingkat kepatuhan dan akuntabilitas satuan kerja dalam pengelolaan keuangan negara. Setiap temuan yang diidentifikasi oleh BPK harus ditindaklanjuti secara sistematis dan tepat waktu untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran sesuai dengan regulasi dan prinsip transparansi.

Proses penyelesaian temuan BPK di BPPMHKP Babel dilakukan melalui serangkaian langkah, termasuk verifikasi administrasi, perbaikan prosedur, serta peningkatan pengawasan internal guna mencegah terjadinya temuan serupa di masa mendatang. Langkah-langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Pada tahun 2024, indikator kinerja Penyelesaian Temuan BPK lingkup BPPMHKP Babel ditargetkan sebesar 100%. Pada Triwulan IV, target ini berhasil terealisasi 100%, sehingga menunjukkan bahwa seluruh temuan telah ditindaklanjuti dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

#### IK13. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja merupakan indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi yang diberikan dalam proses pengawasan telah diterapkan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai dengan standar mutu, regulasi yang berlaku, serta prinsip tata kelola yang baik.

Implementasi rekomendasi hasil pengawasan di BPPMHKP Babel mencakup berbagai aspek, seperti peningkatan prosedur layanan, perbaikan sistem manajemen, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan menerapkan rekomendasi pengawasan secara konsisten, BPPMHKP Babel dapat terus memperbaiki kinerja dan meminimalisir potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Pada tahun 2024, indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup BPPMHKP Babel ditargetkan sebesar 80%. Pada Triwulan IV, target ini berhasil terealisasi sebesar 100%, dengan capaian 120%, yang menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi hasil pengawasan telah diterapkan dengan optimal untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

#### IK14. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang

Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa lingkup BPPMHKP Babel dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam proses pengadaan barang / jasa. Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik serta pengembangan perekonomian nasional dan daerah.

Evaluasi terhadap tingkat kepatuhan pengadaan barang / jasa mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan pengadaan. BPPMHKP Babel terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan dalam pengadaan barang dan jasa guna mendukung operasional yang optimal serta memastikan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Pada tahun 2024, indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa lingkup BPPMHKP Babel ditargetkan sebesar 80%. Pada Triwulan IV, target ini berhasil terealisasi sebesar 84,34%, dengan capaian 105,43%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang / jasa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengalami peningkatan dalam aspek kepatuhan serta efektivitasnya.

#### IK15. Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang

Kegiatan pengelolaan BMN lingkup BPPMHKP Babel dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nilai Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut yaitu:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (bobot 12,5%)
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST hingga Triwulan IV Tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%)
3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi rusak berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 (bobot 25%)
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST) / Berita Acara Pemakaian (bobot 25%)
5. Penyusunan / penyampaian Laporan BMN (Semester dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%)

Capaian indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP Babel Triwulan IV Tahun 2024 adalah 97,50%, sesuai Surat dari Sekretaris BPPMHKP

Nomor B.67/BPPMHKP.1/PL.760/II/2025 tanggal 03 Januari 2025 tentang Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPMHKP Tahun 2024.

### 3.3. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran BPPMHKP BABEL pada tahun anggaran sebesar Rp. 5.836.936.000 Anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp. 5.461.683.000 dan PNPB sebesar Rp. 260.540.000

Realisasi penyerapan anggaran BPPMHKP BABEL pada Triwulan IV Tahun 2024 mencapai Rp. . 2.679.496.736 atau sebesar 46,83 %. Rekapitulasi penyerapan anggaran BPPMHKP BABEL T.A 2024 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 2 dan Tabel 3

Tabel 2. Penyerapan Anggaran per Kegiatan Triwulan IV 2024

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI TW IV	%
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas	5.401.936.000	5.386.060.817	99,71
2	Pengendalian Mutu	339.000.000	285.945.555	84,35
3	Manajemen Mutu	96.000.000	686.934.220	90,56
	<b>TOTAL</b>	<b>5.722.223.000</b>	<b>4.033.460.239</b>	<b>98,66</b>

Tabel 3. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan IV 2024

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI TW IV	%
1	Belanja Pegawai	3.068.504.000	3.065.578.687	99,90
2	Belanja Barang	2.768.432.000	2.693.361.905	97,29
	<b>TOTAL</b>	<b>5.836.936.000</b>	<b>5.758.940.592</b>	<b>98,66</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024, BPPMHKP Babel telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam berbagai indikator kinerja utama. Capaian yang diraih menunjukkan peningkatan efektivitas pengelolaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan peran BPPMHKP Babel dalam memastikan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Beberapa indikator yang mengalami capaian signifikan antara lain:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik mencapai 3,79 dengan kategori sangat baik, melampaui target 3,36 dengan capaian 112,80%.
2. Tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa mencapai 84,34% dengan capaian 105,43%, menunjukkan kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi.
3. Indeks Profesionalitas ASN mencapai 89,22, melampaui target 86 dengan capaian 103,74%, mencerminkan peningkatan kompetensi SDM dalam mendukung pelayanan publik.
4. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai 97,67, lebih tinggi dari target 93,76, dengan capaian 104,17%, yang mencerminkan efektivitas pengelolaan anggaran.
5. Persentase penyelesaian temuan BPK berhasil mencapai 100%, menegaskan kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan keuangan dan aset negara.
6. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja mencapai 100%, dengan capaian 120%, menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi pengawasan telah diterapkan secara optimal.

Secara keseluruhan, BPPMHKP Babel telah menunjukkan peningkatan kinerja yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Triwulan IV Tahun 2024. Hal ini merupakan hasil dari komitmen dalam menerapkan tata kelola yang baik, inovasi layanan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

#### **4.2. REKOMENDASI**

Meskipun capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang sangat baik, beberapa rekomendasi perlu diperhatikan untuk peningkatan di masa mendatang:

1. Peningkatan Inovasi Layanan Publik
  - Perluas implementasi POPI (Pojok Pengaduan dan Informasi) agar dapat menjangkau lebih banyak pengguna jasa dan memberikan akses informasi yang lebih cepat serta akurat.

2. Penguatan Pengelolaan Anggaran
  - Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran agar capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) semakin optimal dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas keuangan negara.
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
  - Melanjutkan program pelatihan dan sertifikasi bagi ASN guna meningkatkan kompetensi dalam bidang mutu, keamanan hasil perikanan, serta pengelolaan keuangan dan aset.
4. Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
  - Memastikan pemanfaatan BMN lebih optimal dengan meningkatkan sistem pengawasan dan pengelolaan agar tingkat kepatuhan semakin tinggi.
5. Evaluasi dan Penguatan Sistem Pengawasan Mutu
  - Mengoptimalkan pengawasan mutu hasil perikanan, baik sektor produksi primer maupun pasca panen, untuk menjaga kualitas ekspor dan memenuhi standar internasional.

Dengan rekomendasi ini, diharapkan BPPMHKP Babel dapat terus meningkatkan kinerja dan mempertahankan capaian yang telah diraih. Komitmen terhadap tata kelola yang baik serta inovasi yang berkelanjutan akan menjadi kunci dalam meningkatkan mutu layanan dan akuntabilitas organisasi di masa mendatang.